

**PARADIGMA TEOLOGI PUBLIK MUSDAH MULIA
(MENGHADAPI INDUSTRIALISASI ALGORITMA DIGITAL)**

Syarifudin¹, Ibnujarir², Nurdin³

^{1,2}UIN A.M. Sangadji Ambon, Indonesia

³ Universitas Islam DDI AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, Indonesia

E-mail: syarifudin@uinambon.ac.id, ibnujarir1818@gmail.com, nurdindakka74@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pemikiran Musdah Mulia tentang teologi publik dalam konteks kontemporer dengan menitikberatkan pada perlindungan kaum minoritas di tengah dinamika ruang digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menelusuri bagaimana pemikiran teologi publik Musdah Mulia dipahami sebagai praksis etis dalam menghadirkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan kaum minoritas di ruang publik, dari bahaya industrialisasi algoritma digital. Selain itu, kajian ini juga melakukan analisis komparatif antara gagasan Musdah Mulia dan pemikiran teolog publik global seperti Jürgen Habermas, David Tracy, dan Miroslav Volf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teologi publik Musdah Mulia memiliki orientasi yang kuat pada perlindungan kelompok rentan yang minoritas, advokasi keadilan sosial, serta kritik terhadap algoritma digital, struktur kekuasaan yang eksploitatif, termasuk dalam lanskap digital materialistik oriented. Dalam era disrupsi teknologi, ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi kepentingan melalui praktik proxy war berbasis informasi, disinformasi, dan manipulasi opini publik demi industrialisasi algoritma digital. Perkembangan kecerdasan artifisial turut memperkuat peran algoritma dalam membentuk realitas sosial, sekaligus membuka potensi bias, dehumanisasi, dan ketimpangan akses pengetahuan bagi kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, teologi publik Musdah Mulia menawarkan kerangka etis-kritis yang relevan untuk membangun kesadaran bangsa secara kolektif terhadap bahaya dominasi algoritma digital serta pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan teknologi humanis. Teologi publik tidak hanya berfungsi sebagai refleksi normatif, tetapi juga sebagai praksis dialogis yang mendorong literasi digital kritis, solidaritas lintas identitas, dan resistensi terhadap narasi destruktif. Dengan demikian, teologi publik algoritma digital Musdah Mulia menjadi instrumen strategis dalam menata ruang digital yang lebih adil, inklusif, perlindungan terhadap kaum minoritas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kata kunci: teologi publik, ruang digital, algoritma, proxy war

ABSTRACT

This paper examines Musdah Mulia's thought on public theology within a contemporary context, focusing on the protection of minorities amidst the increasingly complex dynamics of the digital sphere. Employing a qualitative approach based on a literature review, the study explores how Musdah Mulia's public theology is understood as an ethical praxis—one that champions justice, humanity, and the liberation of minorities in the public sphere from the perils of the digital algorithm industry. Furthermore, the study conducts a comparative analysis between Musdah Mulia's ideas and the perspectives of global public theologians such as Jürgen Habermas, David Tracy, and Miroslav Volf. The findings indicate that Musdah Mulia's public theology is strongly oriented toward protecting vulnerable minority groups, advocating for social justice, and critiquing digital algorithms and exploitative power structures—particularly within a digitally driven, materialistic landscape. In this era of technological disruption, the digital sphere serves not merely as a medium of communication but also as an arena where interests clash through information-based proxy wars, disinformation, and the manipulation of public opinion to fuel the digital algorithm industry. The advancement of artificial intelligence further amplifies the role of algorithms in shaping social reality, while simultaneously creating potential for bias, dehumanization, and unequal access to knowledge. Against this backdrop, Musdah Mulia's public theology offers a relevant ethical-critical framework for fostering collective

national awareness regarding the dangers of digital algorithmic dominance and the necessity of humanistic values in technology management. Public theology functions not only as normative reflection but also as a dialogic praxis that promotes critical digital literacy, cross-identity solidarity, and resistance against destructive narratives. Thus, Musdah Mulia's public theology of digital algorithms serves as a strategic instrument for shaping a digital space that is fairer and more inclusive, protects minorities, and is oriented toward the common good amidst increasingly complex global challenges.

Keywords: public theology, digital space, algorithms, proxy war

Latar Belakang

Dalam era digital kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD), ruang publik mengalami transformasi besar dari ruang fisik ke ruang virtual. Media sosial menjadi arena utama pembentukan opini publik. Namun, fenomena ini tidak selalu membawa dampak positif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial sering memperkuat polarisasi, membentuk opini publik, adanya ujaran kebencian, *proximity*, pencurian data, *cyber crime*, dan disinformasi.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ideologi bangsa karena Indonesia tumbuh dengan ornament keberagaman ekstrem agama, bahasa, etnis, budaya, bahasa dan preferensi ideologis bertemu dalam satu lanskap yang sama bernama Indonesia. Namun, keberagaman ini tidak otomatis melahirkan solidaritas, justru sering menjadi sumber gesekan secara fisik. Bila di ruang fisik tidak selesai maka ruang digital tempat pertemuan dengan dinamika ruang publik digital yang serba cepat, anonim, dan minim kontrol krisis etika, moral, dan akhlaq.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital di Indonesia mengalami transformasi menjadi arena utama produksi dan distribusi wacana keagamaan. Platform ruang publik di media sosial seperti Facebook, X, dan TikTok tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga medan kontestasi tafsir keagamaan. Sayangnya, algoritma yang mengedepankan engagement sering kali memperkuat polarisasi, mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta mempersempit ruang dialog rasional. Akibatnya, solidaritas sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa justru mengalami fragmentasi akibat dominasi kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD).

Di titik ini, pendekatan teologi konvensional yang eksklusif dan normatif tidak lagi memadai untuk pertumbuhan Indonesia yang sangat majemuk. Ia cenderung berbicara ke dalam komunitas sendiri dan gagal menjawab problem sosial yang nyata di ruang publik media sosial. Saat ini dibutuhkan

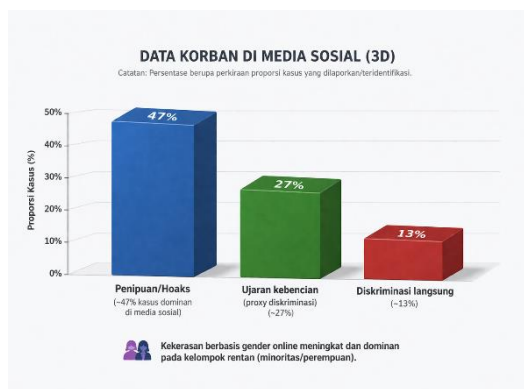
paradigma baru untuk menjawab kebutuhan publik yang mampu melindungi kaum minoritas, menjembatani nilai-nilai keagamaan moderat dengan realitas sosial yang plural dan dinamis. Di sinilah relevansi pemikiran Musdah Mulia tentang Teologi Publik untuk melawan arus kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD).

Teologi Publik yang dikembangkan Musdah Mulia menekankan bahwa agama tidak boleh berhenti sebagai doktrin privat, tetapi harus hadir sebagai kekuatan etis yang membela keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan di ruang publik. Pendekatan ini menggeser orientasi dari klaim kebenaran tunggal menuju praksis kemaslahatan bersama. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, Teologi Publik berfungsi sebagai instrumen untuk membangun solidaritas lintas identitas di media sosial dengan menekankan nilai universal seperti empati, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Namun, tantangan utama saat ini adalah bagaimana mentransformasikan gagasan Teologi Publik Musdah Mulia ke dalam ekosistem media digital yang kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD), cenderung fragmentatif dan konflikual. Tanpa intervensi yang strategis, ruang digital akan terus didominasi oleh narasi keagamaan yang eksklusif, simplistik, dan sering kali provokatif. Ini bukan sekadar persoalan wacana, tetapi berdampak langsung pada kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Oleh karena itu, mengintegrasikan Teologi Publik Musdah Mulia ke dalam ruang publik digital menjadi sebuah kebutuhan strategis, bukan pilihan. Upaya ini penting untuk menyehatkan kembali solidaritas sosial di media sosial yang tergerus, sekaligus memastikan bahwa keberagaman Indonesia tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk mencapai kemaslahatan bangsa secara kolektif.

Data korban di ruang publik media sosial dalam konteks ini, teologi publik Musdah Mulia menjadi penting sebagai katub



pengaman di media sosial dan kerangka etis untuk mengarahkan kehidupan bangsa di ruang publik media sosial. Musdah Mulia sebagai salah satu pemikir progresif Indonesia menawarkan pendekatan teologi publik algoritma spiritual moderat yang berakar pada nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Perkembangan ruang publik kontemporer, khususnya dalam era digital, menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola interaksi sosial, produksi pengetahuan, dan pembentukan opini publik. Media sosial yang semestinya menjadi ruang solidaritas justru sering bertransformasi menjadi arena konflik, disinformasi, serta praktik dehumanisasi berbasis algoritma. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika dan krisis teologi publik.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Musdah Mulia tentang teologi publik menjadi relevan untuk dikaji. Ia menekankan bahwa teologi publik tidak hanya berhenti pada ranah privat atau ritualistik, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral dalam kehidupan ruang publik di media sosial yang menjamin keadilan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Musdah Mulia melihat bahwa agama memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual untuk membela kelompok rentan, kaum minoritas agama, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya termasuk marginal dari kekuatan kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD). Perspektif ini sejalan

dengan semangat perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari yang menempatkan agama sebagai alat perlawanan terhadap kebatilan, termasuk kolonialisme dan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, teologi publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga emansipatoris.

Lebih jauh, dalam konteks kontemporer, Musdah Mulia mengkritik dominasi algoritma media sosial yang membentuk opini publik secara tidak sehat. Algoritma tidak netral; ia mengonstruksi realitas sosial dan bahkan memengaruhi cara beragama di ruang publik. Akibatnya, muncul “teologi algoritmik” yang seringkali bias, intoleran, dan tidak humanis. Kondisi ini menunjukkan urgensi pengembangan paradigma baru teologi publik yang mampu:

- Mengoreksi distorsi moral dalam ruang digital
- Mengembalikan fungsi agama sebagai kekuatan pembebasan
- Menjadikan media sosial sebagai ruang perdamaian, bukan konflik

Selain itu, Musdah Mulia juga mengaitkan krisis teologi publik dengan berbagai problem sosial yang ditumpahkan di media sosial seperti kerusakan lingkungan, buruknya pelayanan publik, dan rendahnya kualitas interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teologi publik memiliki dimensi praksis yang luas, mencakup etika lingkungan, tata kelola transportasi, hingga pelayanan sosial publik seperti pelayanan publik bidang transportasi yang kurang manusiawi yang terjadi di daerah-daerah. Semua persoalan ini membutuhkan kajian mendalam dengan mempercakapkan kajian sebelumnya yang telah ditemukan oleh para ahli. Berikut ini pandangan para ahli terkait dengan teologi publik.

A. Kajian Teori: Teologi Publik dan Percakapan Teologis

Teologi publik menurut David Tracy (1981) adalah refleksi iman yang berinteraksi dengan tiga publik: gereja, akademik, dan masyarakat luas. Sementara itu, Jürgen Habermas (2006) menekankan pentingnya agama dalam ruang publik sebagai sumber moralitas. Musdah Mulia mendefinisikan Teologi Publik adalah Studi untuk membangun

keadaban dalam pelayanan publik untuk membangun bangsa yang bermartabat. Konsep percakapan teologis publik menekankan: Dialog antar iman, Rasionalitas public, Etika komunikasi.

1. Konsep Dasar Teologi Publik

Teologi publik merupakan perkembangan mutakhir dalam studi teologi yang menempatkan refleksi iman dalam ruang publik, bukan hanya dalam komunitas gereja. Secara umum, teologi publik dipahami sebagai upaya dialogis antara teologi Kristen dengan masyarakat luas dalam membahas isu-isu bersama demi kebaikan umum. David Tracy menegaskan bahwa teologi publik harus berinteraksi dengan tiga “publik” utama, yaitu: Gereja, Akademik, Masyarakat luas.

Dengan demikian, teologi publik menuntut bahasa yang terbuka, rasional, dan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak eksklusif teologis. Dalam konteks Indonesia, teologi publik muncul sebagai respons terhadap meningkatnya peran agama dalam ruang publik, sehingga teologi tidak lagi bersifat privat, melainkan turut membentuk dinamika sosial. Dalam kajian Miroslav Volf Teologi rekonsiliasi dan keterlibatan public. Volf belum menjangkau teologi public sampai perlindungan kaum minoritas, dari aspek agama, pengetahuan, dan keterampilan digital. Sedangkan kajian pemikiran teologi public Musdah Mulia lebih jauh menjelaskan perlindungan pada kaum minoritas akses digital, dan bahaya dari industrialisasi algoritma digital di ruang public.

Karakteristik kajian literatur dan Pendekatan Teologi Publik pembahsan utamanya terkait teologi public pada aspek; *Dialogis*: melibatkan interaksi dua arah antara iman dan realitas sosial, *Interdisipliner*: menggunakan ilmu sosial, politik, ekonomi, *Kontekstual*: dipengaruhi kondisi lokal (misalnya Asia vs Barat), Kritis dan konstruktif: tidak hanya menganalisis tetapi memberi Solusi, Teologi publik bahkan dipandang sebagai teologi yang “hidup di jalanan”, bukan hanya di ruang kelas atau mimbar gereja. Ia berkembang bersamaan

dengan praktik sosial, bukan sekadar teori. Dalam perspektif Asia, terdapat kritik bahwa teologi publik Barat sering terlalu berakar pada asumsi post-Enlightenment, sehingga perlu dikontekstualisasi dengan realitas masyarakat Asia yang plural dan religius.

2. Pandangan Para Ahli Tentang Teologi Publik

Percakapan Konseptual: Teologi Publik antara Tradisi dan Tantangan Digital Narator Dalam lanskap teologi publik, para pemikir mengembangkan pendekatan berbeda: studi tokoh, analisis konsep, dan praktik konkret. Namun, muncul pertanyaan baru: apakah kerangka klasik ini cukup untuk menjawab bentuk penindasan kontemporer, terutama di ruang digital? Preman Niles (Representasi Pemikiran) “Teologi publik harus keluar dari pusat kekuasaan dan masuk ke masyarakat yang terpinggirkan. Wawasan ini belum memberikan satu keseimbangan karena meninggalkan ruang digital kemudian merawat masyarakat pinggiran satu konsep pemikiran yang tidak menyelesaikan masalah di ruang publik.

Penting untuk dipahami bahwa keadaban ruang publik juga mencakup keadaban digital di media sosial. Jika kita melihat sekilas bagaimana orang berkomunikasi di ruang digital, baik melalui media sosial maupun mesin pencari, terlihat jelas bahwa interaksi di sana sering dipenuhi oleh hoaks, fitnah, caci maki, perundungan, penipuan, dan berbagai hal negatif lainnya. Memang masih ada sisi positif, seperti penggunaan untuk pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, dakwah, dan kegiatan ekonomi. Namun, kenyataannya, hal-hal negatif masih lebih menonjol. Tapi ada kekuasaan baru yang saat ini bebas bergerak adalah kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD). Penguasa opini di ruang publik di media sosial juga harus membangun teologi publik yang lebih humanis dan persuasif agar dua kutub sosial dan spiritual bisa kerjasama membangun literasi kemanusiaan melalui studi teologi publik algoritma digital.

Pada tahun 2021, Microsoft merilis Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index) yang mengukur perilaku pengguna internet di 32 negara. Survei ini melibatkan lebih dari 16.000 responden, termasuk dari Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa warganet Indonesia memiliki tingkat keadaban digital yang rendah, bahkan termasuk yang terburuk di Asia. Sementara itu, Singapura dan Taiwan justru masuk lima besar dunia, masing-masing di posisi keempat dan kelima dengan skor yang tinggi. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-29 dari 32 negara, hanya lebih baik dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan.

Menariknya, survei tersebut juga menemukan bahwa remaja berusia 13–16 tahun justru lebih sopan dibandingkan orang dewasa dalam berinteraksi di dunia digital. Untuk merespons kondisi ini, Microsoft memperkenalkan konsep *Digital Civility Challenge* yang berisi empat prinsip utama dalam berinternet. Salah satunya adalah menerapkan “golden rule”, yaitu memperlakukan orang lain dengan hormat, empati, dan kebaikan dalam setiap interaksi di ruang digital. Percakapan ini lebih melihat aspek empaty orang dewasa dan remaja, tetapi tidak tajam melihat wawasan teologi public digital yang kurang diperdalam oleh pemahaman teologi public digital.

Teologi publik yang ditawarkan oleh Musda Mulya Wawasan Teologi publik membangun dialektika dialogis, terbuka segala umur, lintas budaya, agama, dan bahasa untuk bersama-sama merumuskan wawasan teologi publik yang mampu merawat orang-orang yang termarjinalkan atau terpinggirkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial.” Musda Mulya (Respon Kritis) “Pendekatan itu relevan, tetapi ‘pinggiran’ hari ini tidak hanya geografis atau sosial, melainkan juga digital. Algoritma media sosial menciptakan bentuk marginalisasi baru yang tidak kasat mata. Teologi publik harus membebaskan manusia dari manipulasi digital yang membentuk opini, identitas, bahkan moralitas.”

Analisis Niles menekankan bentuk-bentuk marginalitas yang berakar pada struktur sosial tradisional, sementara Musdah Mulia

memperluas horizon tersebut ke dalam konfigurasi marginalitas digital. Keterbatasan utama dalam kerangka Niles terletak pada absennya antisipasi terhadap dominasi teknologi sebagai locus baru produksi dan reproduksi penindasan.

Dalam spektrum lain, Stanley Hauerwas menegaskan bahwa komunitas gereja merupakan basis utama kesaksian publik, sehingga teologi publik tidak boleh tereduksi hingga kehilangan identitas iman dalam keterlibatannya di ruang sosial. Namun, posisi ini dikritisi oleh Musdah Mulia yang menekankan bahwa pemeliharaan identitas iman menjadi tidak memadai ketika komunitas religius gagal memahami bagaimana algoritma membentuk kesadaran, preferensi, dan bahkan horizon moral umat. Dalam konteks ini, kesaksian iman berisiko mengalami distorsi dan manipulasi.

Dengan demikian, teologi publik digital menuntut pergeseran paradigma: dari sekadar afirmasi identitas komunitas menuju keterlibatan kritis terhadap sistem digital yang memediasi realitas publik. Di sini, isu etika digital menjadi sentral, mencakup bagaimana kebenaran, kejujuran, dan akhlak diproduksi, disirkulasikan, serta dipertahankan dalam ekosistem media sosial. Analisis Hauerwas tetap signifikan dalam menjaga integritas komunitas, tetapi belum operasional dalam menghadapi kompleksitas infrastruktur digital. Sebaliknya, Musdah Mulia mengintervensi diskursus dengan menggeser fokus dari komunitas sebagai aktor utama ke sistem digital sebagai arena pembentukan kesadaran kolektif.

Pendekatan Praktis (Representasi Penelitian Kontemporer) “Teologi publik diterapkan dalam pendidikan agama, pariwisata berbasis keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat.” Musdah Mulia (Respon Kritis) “Implementasi ini masih berada pada ranah fisik dan institusional. Padahal, ruang publik terbesar hari ini adalah ruang digital. Tanpa intervensi teologis di sana, pendidikan dan pembangunan hanya menyentuh permukaan. Kita membutuhkan teologi publik yang: 1). Membebaskan dari

manipulasi informasi, 2). Mengkritik industrialisasi algoritma, 3). Menjamin keadilan dan martabat manusia di media sosial.

Analisis para ilmuwan terkait perbedaan cara pandang tentang teologi publik. Para ahli menggunakan pendekatan praktis dan konvensional transformasi digital di ruang publik. Musdah Mulia menawarkan perluasan arena praksis teologi publik ke algoritma digital humanis dan persuasif demi perbaikan algoritma digital untuk kepentingan bangsa yang majemuk. Berikut perbedaan cara pandang penyelamatan ruang publik sebagai basis ekspresi akademik dengan wawasan sebagai berikut;

David Tracy	Jürgen Habermas	Miroslav Volf	Musdah Mulia
Fokus marginalitas	Rasionalitas komunikatif & ruang publik digital	Sosial-ekonomi	Pendekatan Klasik
Basis etika		Teologi rekonsiliasi & keterlibatan publik	Mengidentifikasi bentuk penindasan baru yang subtil, Moral, Digital
Teologi sebagai dialog lintas publik		Komunitas iman	Lebih kontekstual dengan era digital, b). Mengidentifikasi bentuk penindasan baru yang subtil, Moral, Digital
Arena praksis		Institusi masyarakat	agar tidak berhenti pada kritik normative. Etika akhlak digital. Dalam pandangan Musdah Mulia bahwa Kaum materialis, Pengembangan algoritma digital. Jika ingin mengembangkan teologi publik yang relevan hari ini, langkah strategisnya: Integrasi Etika Digital ke Teologi Publik. Bukan sekadar tambahan, tetapi sebagai inti pembahasan, Analisis Kekuasaan Sosial & Media Sosial & Memahami bagaimana platform digital membentuk realitas sosial, Rekonstruksi Konsep "Publik" Publik tidak lagi hanya ruang fisik, tetapi juga ruang digital yang dikendalikan korporasi. Produksi Praktik algoritmik nations
Tujuan pembebasan		Ketidakadilan sosial	Nyata; a). Literasi digital berbasis teologi, b). Advokasi keadilan algoritmik, c). Etika bermedia sosial berbasis nilai iman.

Dari empat ilmuwan tersebut di atas wawasan teologi publik memiliki cara pandang berbeda. Perbedaan ini akibat beberapa aspek seperti; beda keilmuan, beda budaya dan neda fokus penelitian. Tetapi ada kedekatan pemikiran yang memberikan rasionalitas terhadap bagaimana merawat ruang publik jadi kehidupan bersama. Gagasan yang ditawarkan Musdah Mulia perlu evaluasi Kritis Pendekatan klasik ke teologi publik yang lebih moderat untuk melindungi umat manusia dari pertikain di ruang digital. Pemikiran sebelumnya cenderung lambat merespons

perubahan teknologi yang semakin tidak terbandung.

Pada pemikiran sebelumnya lebih fokus pada teologi lintas iman, lintas publik, sama sekali belum memberikan wawasan baru terkait dengan perlindungan kaum minoritas terhadap bahaya algoritma digital yang sudah digagas oleh Musdah Mulia. Berbeda dengan David Tracy yang menggagas Teologi sebagai dialog lintas public lebih konvensional karena membutuhkan ruang public yang resmi dan birokratis, menghadirkan pemuka agama lintas iman untuk merawat hamoni kehidupan.

David Tracy Terlalu fokus pada struktur sosial lama, Kurang memahami kekuasaan

non-mainstream (Musdah Mulia, AI, platform digital), Sementara itu, gagasan Musdah Mulya: a). Lebih kontekstual dengan era digital, b). Mengidentifikasi bentuk penindasan baru yang subtil, Moral, Digital. Namun masih membutuhkan kerangka metodologis yang lebih sistematis agar tidak berhenti pada kritik normative. Etika akhlak digital. Dalam pandangan Musdah Mulia bahwa Kaum materialis, Pengembangan algoritma digital. Jika ingin mengembangkan teologi publik yang relevan hari ini, langkah strategisnya: Integrasi Etika Digital ke Teologi Publik. Bukan sekadar tambahan, tetapi sebagai inti pembahasan, Analisis Kekuasaan Sosial & Media Sosial & Memahami bagaimana platform digital membentuk realitas sosial, Rekonstruksi Konsep "Publik" Publik tidak lagi hanya ruang fisik, tetapi juga ruang digital yang dikendalikan korporasi. Produksi Praktik algoritmik nations

Teologi publik klasik memberi fondasi, tetapi tanpa ekspansi ke ranah digital seperti yang ditawarkan Musdah Mulya, ia berisiko menjadi usang. Tantangan utama bukan lagi sekadar berbicara di ruang publik tanpa ada teologi publik untuk menata algoritma publik lebih humanis dan persuasif untuk menjaga dan melindungi kaum minoritas dari aspek agama, pengetahuan, keterampilan teknologi. Mencegah terjadinya dominasi kendali ruang media digital melalui kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD).

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis **studi literatur (library research)**. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam gagasan teologi publik Musdah Mulia dalam merespons dinamika ruang digital dan perlindungan kaum minoritas.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang dibagi menjadi dua kategori: Data Primer: Karya-karya pemikiran Siti Musdah Mulia yang memuat gagasan mengenai teologi publik, keadilan sosial, hak-hak minoritas, kemanusiaan, serta pandangannya terkait tantangan teknologi dan ruang publik digital. Data Sekunder: Referensi pendukung yang relevan dengan topik kajian, meliputi:

- Karya-karya teolog dan pemikir publik global seperti Jürgen Habermas, David Tracy, dan Miroslav Volf.
- Jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen pendukung yang membahas isu industrialisasi algoritma digital, *proxy war* informasi, kecerdasan artifisial (AI), serta ruang publik digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentation study*). Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi literatur-literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mendokumentasikannya secara tematis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan kombinasi teknik analisis teks kualitatif:

- Analisis Isi (*Content Analysis*): Digunakan untuk membedah teks dan pemikiran Musdah Mulia guna menemukan kerangka etis-kritis teologi publiknya dalam mengadvokasi kaum minoritas di era industrialisasi algoritma.

- Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*): Digunakan untuk membandingkan gagasan teologi publik Musdah Mulia dengan gagasan teolog publik global (Habermas, Tracy, dan Volf) untuk menemukan komparasi pemikiran, titik temu (*convergence*), serta keunikan kontribusi pemikiran Musdah Mulia dalam konteks kontemporer.
- Analisis Kritis (*Critical Analysis*): Digunakan untuk menguji dan mengevaluasi bagaimana teologi publik dijadikan praksis dialogis-etis dalam merespons ancaman disrupsi teknologi, bias AI, *proxy war*, dan dehumanisasi digital.

5. Kerangka Berpikir / Prosedur Analisis

Prosedur analisis penelitian ini ditempuh melalui tahapan berikut:

- Reduksi Data: Menyeleksi literatur yang secara spesifik membahas teologi publik, ruang digital, algoritma, dan perlindungan minoritas.
- Kategorisasi dan Display Data: Mengelompokkan gagasan Musdah Mulia serta menyajikannya secara sistematis berdampingan dengan pemikiran Habermas, Tracy, dan Volf.
- Interpretasi Komparatif: Melakukan interpretasi mendalam terhadap praksis etis teologi publik Musdah Mulia di tengah eksploitasi algoritma materialistik.
- Penarikan Kesimpulan: Merumuskan teologi publik algoritma digital Musdah Mulia sebagai kerangka strategis dan inklusif untuk kemaslahatan bersama.

Hasil dan Pembahasan

A. Kajian Teori: Teologi Publik dan Percakapan Teologis

Teologi publik menurut David Tracy (1981) adalah refleksi iman yang berinteraksi dengan tiga publik: gereja, akademik, dan masyarakat luas. Sementara itu, Jürgen Habermas (2006) menekankan pentingnya agama dalam ruang publik sebagai sumber moralitas. Musdah Mulia mendefinisikan Teologi Publik adalah Studi untuk membangun keadaban dalam pelayanan publik untuk membangun bangsa yang bermartabat. Konsep

percakapan teologis publik menekankan: Dialog antar iman, Rasionalitas public, Etika komunikasi.

1. Konsep Dasar Teologi Publik

Teologi publik merupakan perkembangan mutakhir dalam studi teologi yang menempatkan refleksi iman dalam ruang publik, bukan hanya dalam komunitas gereja. Secara umum, teologi publik dipahami sebagai upaya dialogis antara teologi Kristen dengan masyarakat luas dalam membahas isu-isu bersama demi kebaikan umum. David Tracy menegaskan bahwa teologi publik harus berinteraksi dengan tiga “publik” utama, yaitu: Gereja, Akademik, Masyarakat luas.

Dengan demikian, teologi publik menuntut bahasa yang terbuka, rasional, dan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak eksklusif teologis. Dalam konteks Indonesia, teologi publik muncul sebagai respons terhadap meningkatnya peran agama dalam ruang publik, sehingga teologi tidak lagi bersifat privat, melainkan turut membentuk dinamika sosial. Dalam kajian Miroslav Volf Teologi rekonsiliasi dan keterlibatan public. Volf belum mengjangkau teologi public sampai perlindungan kaum minoritas, dari aspek agama, pengetahuan, dan keterampilan digital. Sedangkan kajian pemikiran teologi public Musdah Mulia lebih jauh menjelaskan perlindungan pada kaum minoritas akses digital, dan bahaya dari industrialisasi algoritma digital di ruang public.

Karakteristik kajian literatur dan Pendekatan Teologi Publik pembahsan utamanya terkait teologi public pada aspek; *Dialogis*: melibatkan interaksi dua arah antara iman dan realitas sosial, *Interdisipliner*: menggunakan ilmu sosial, politik, ekonomi, *Kontekstual*: dipengaruhi kondisi lokal (misalnya Asia vs Barat), Kritis dan konstruktif: tidak hanya menganalisis tetapi memberi Solusi, Teologi publik bahkan dipandang sebagai teologi yang “hidup di jalanan”, bukan hanya di ruang kelas atau mimbar gereja. Ia berkembang bersamaan dengan praktik sosial, bukan sekadar teori. Dalam perspektif Asia, terdapat kritik bahwa teologi publik Barat sering terlalu berakar pada

asumsi post-Enlightenment, sehingga perlu dikontekstualisasi dengan realitas masyarakat Asia yang plural dan religius.

2. Pandangan Para Ahli Tentang Teologi Publik

Percakapan Konseptual: Teologi Publik antara Tradisi dan Tantangan Digital Narator Dalam lanskap teologi publik, para pemikir mengembangkan pendekatan berbeda: studi tokoh, analisis konsep, dan praktik konkret. Namun, muncul pertanyaan baru: apakah kerangka klasik ini cukup untuk menjawab bentuk penindasan kontemporer, terutama di ruang digital? Preman Niles (Representasi Pemikiran) “Teologi publik harus keluar dari pusat kekuasaan dan masuk ke masyarakat yang terpinggiran. Wawasan ini belum memberikan satu keseimbangan karena meninggalkan ruang digital kemudian merawat masyarakat pinggiran satu konsep pemikiran yang tidak menyelesaikan masalah di ruang publik.

Penting untuk dipahami bahwa keadaan ruang publik juga mencakup keadaan digital di media sosial. Jika kita melihat sekilas bagaimana orang berkomunikasi di ruang digital, baik melalui media sosial maupun mesin pencari, terlihat jelas bahwa interaksi di sana sering dipenuhi oleh hoaks, fitnah, caci maki, perundungan, penipuan, dan berbagai hal negatif lainnya. Memang masih ada sisi positif, seperti penggunaan untuk pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, dakwah, dan kegiatan ekonomi. Namun, kenyataannya, hal-hal negatif masih lebih menonjol. Tapi ada kekuasaan baru yang saat ini bebas bergerak adalah kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD). Penguasa opini di ruang publik di media sosial juga harus membangun teologi publik yang lebih humanis dan persuasif agar dua kutub sosial dan spiritual bisa kerjasama membangun literasi kemanusiaan melalui studi teologi publik algoritma digital.

Pada tahun 2021, Microsoft merilis Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index) yang mengukur perilaku pengguna internet di 32 negara. Survei ini melibatkan lebih dari 16.000 responden, termasuk dari

Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa warganet Indonesia memiliki tingkat keadaban digital yang rendah, bahkan termasuk yang terburuk di Asia. Sementara itu, Singapura dan Taiwan justru masuk lima besar dunia, masing-masing di posisi keempat dan kelima dengan skor yang tinggi. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-29 dari 32 negara, hanya lebih baik dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan.

Menariknya, survei tersebut juga menemukan bahwa remaja berusia 13–16 tahun justru lebih sopan dibandingkan orang dewasa dalam berinteraksi di dunia digital. Untuk merespons kondisi ini, Microsoft memperkenalkan konsep *Digital Civility Challenge* yang berisi empat prinsip utama dalam berinternet. Salah satunya adalah menerapkan “golden rule”, yaitu memperlakukan orang lain dengan hormat, empati, dan kebaikan dalam setiap interaksi di ruang digital. Percakapan ini lebih melihat aspek empaty orang dewasa dan remaja, tetapi tidak tajam melihat wawasan teologi public digital yang kurang diperdalam oleh pemahaman teologi public digital.

Teologi publik yang ditawarkan oleh Musda Mulya Wawasan Teologi publik membangun dialektika dialogis, terbuka segala umur, lintas budaya, agama, dan bahasa untuk bersama-sama merumuskan wawasan teologi publik yang mampu merawat orang-orang yang termarginalkan atau terpinggirkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial.” Musda Mulya (Respon Kritis) “Pendekatan itu relevan, tetapi ‘pinggiran’ hari ini tidak hanya geografis atau sosial, melainkan juga digital. Algoritma media sosial menciptakan bentuk marginalisasi baru yang tidak kasat mata. Teologi publik harus membebaskan manusia dari manipulasi digital yang membentuk opini, identitas, bahkan moralitas.”

Analisis Niles menekankan bentuk-bentuk marginalitas yang berakar pada struktur sosial tradisional, sementara Musdah Mulia memperluas horizon tersebut ke dalam konfigurasi marginalitas digital. Keterbatasan utama dalam kerangka Niles terletak pada absennya antisipasi terhadap dominasi

teknologi sebagai locus baru produksi dan reproduksi penindasan.

Dalam spektrum lain, Stanley Hauerwas menegaskan bahwa komunitas gereja merupakan basis utama kesaksian publik, sehingga teologi publik tidak boleh tereduksi hingga kehilangan identitas iman dalam keterlibatannya di ruang sosial. Namun, posisi ini dikritisi oleh Musdah Mulia yang menekankan bahwa pemeliharaan identitas iman menjadi tidak memadai ketika komunitas religius gagal memahami bagaimana algoritma membentuk kesadaran, preferensi, dan bahkan horizon moral umat. Dalam konteks ini, kesaksian iman berisiko mengalami distorsi dan manipulasi.

Dengan demikian, teologi publik digital menuntut pergeseran paradigma: dari sekadar afirmasi identitas komunitas menuju keterlibatan kritis terhadap sistem digital yang memediasi realitas publik. Di sini, isu etika digital menjadi sentral, mencakup bagaimana kebenaran, kejujuran, dan akhlak diproduksi, disirkulasikan, serta dipertahankan dalam ekosistem media sosial. Analisis Hauerwas tetap signifikan dalam menjaga integritas komunitas, tetapi belum operasional dalam menghadapi kompleksitas infrastruktur digital. Sebaliknya, Musdah Mulia mengintervensi diskursus dengan menggeser fokus dari komunitas sebagai aktor utama ke sistem digital sebagai arena pembentukan kesadaran kolektif.

Pendekatan Praktis (Representasi Penelitian Kontemporer) “Teologi publik diterapkan dalam pendidikan agama, pariwisata berbasis keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat.” Musdah Mulia (Respon Kritis) “Implementasi ini masih berada pada ranah fisik dan institusional. Padahal, ruang publik terbesar hari ini adalah ruang digital. Tanpa intervensi teologis di sana, pendidikan dan pembangunan hanya menyentuh permukaan. Kita membutuhkan teologi publik yang: 1). Membebaskan dari manipulasi informasi, 2). Mengkritik industrialisasi algoritma, 3). Menjamin keadilan dan martabat manusia di media sosial.

Analisis para ilmuwan terkait perbedaan cara pandang tentang teologi publik. Para ahli menggunakan pendekatan praktis dan konvensional transformasi digital di ruang publik. Musdah Mulia menawarkan perluasan arena praksis teologi publik ke algoritma digital humanis dan persuasif demi perbaikan algoritma digital untuk kepentingan bangsa yang majemuk. Berikut perbedaan cara pandang penyelamatan ruang publik sebagai basis ekspresi akademik dengan wawasan sebagai berikut;

David Tracy	Jürgen Habermas	Miroslav Volf	Musdah Mulia
Fokus marginalitas	Rasionalitas komunikatif & ruang publik digital	Sosial-ekonomi	Sosial
Basis etika		Teologi rekonsiliasi & keterlibatan publik	Teologi publik
Teologi sebagai dialog lintas publik		Komunitas iman	Komunitas iman
Arena praksis		Institusi masyarakat	Institusi masyarakat
Tujuan pembebasan		Ketidakadilan sosial	Ketidakadilan sosial

Dari empat ilmuwan tersebut di atas wawasan teologi publik memiliki cara pandang berbeda. Perbedaan ini akibat beberapa aspek seperti; beda keilmuan, beda budaya dan neda fokus penelitian. Tetapi ada kedekatan pemikiran yang memberikan rasionalitas terhadap bagaimana merawat ruang publik jadi kehidupan bersama. Gagasan yang ditawarkan Musdah Mulia perlu evaluasi Kritis Pendekatan klasik ke teologi publik yang lebih moderat untuk melindungi umat manusia dari pertikain di ruang digital. Pemikiran sebelumnya cenderung lambat merespons perubahan teknologi yang semakin tidak terbendung.

Pada pemikiran sebelumnya lebih fokus pada teologi lintas iman, lintas publik, sama sekali belum memberikan wawasan baru terkait dengan perlindungan kaum minoritas terhadap bahaya algoritma digital yang sudah digagas oleh Musdah Mulia. Berbeda dengan David Tracy yang menggagas Teologi sebagai dialog lintas public lebih konvensional karena membutuhkan ruang public yang resmi dan birokratis, menghadirkan pemuka agama lintas iman untuk merawat hamoni kehidupan.

David Tracy Terlalu fokus pada struktur

Musdah Mulia memahami kekuasaan non-manusia (algoritma, AI, platform digital), Sementara itu, gagasan Musdah Mulya: a). Lebih kontekstual dengan era digital, b). Mengidentifikasi bentuk penindasan baru yang subtil, & Namun masih membutuhkan kerangka metodologis yang lebih sistematis agar tidak berhenti pada kritik normative. Dalam pandangan Musdah Mulia bahwa algoritma digital arah Pengembangan Jika ingin mengembangkan teologi publik yang relevan hari ini, langkah strategisnya: Integrasi Etika Digital ke Teologi Publik Bukan sekadar tambahan, tetapi sebagai inti pembahasan, Analisis Kekuasaan Algoritmik Memahami bagaimana platform membentuk realitas sosial, Moderasi digital & Publik tidak lagi hanya ruang fisik, tetapi juga ruang digital yang dikendalikan korporasi Produksi Praktik Nyata; a). Literasi digital berbasis teologi, b). Advokasi keadilan algoritmik, c). Etika bermedia sosial berbasis nilai iman.

Teologi publik klasik memberi fondasi, tetapi tanpa ekspansi ke ranah digital seperti yang ditawarkan Musdah Mulya, ia berisiko menjadi usang. Tantangan utama bukan lagi sekadar berbicara di ruang publik tanpa ada teologi publik untuk menata algoritma publik lebih humanis dan persuasif untuk menjaga dan melindungi kaum mnoritas dari aspek agama, pengetahuan, keterampilan teknologi. Mencegah terjadinya dominasi kendali ruang media digital melalui kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD).

4. Percakapan Teologis (Theological Conversation)

Percakapan teologi publik yang klasik membutuhkan metode baru atau pendekatan dalam menata teologi publik di media sosial. Pemanfaatan digital dialog sebagai proses utama pembentukan studi teologi publik di media sosial. Karakter utama percakapan teologis selama ini antara lain; : a). Partisipatif: melibatkan banyak suara (gereja, masyarakat, agama lain), b). Hermeneutik: menafsirkan realitas dan teks secara Bersama, c). Transformasional: menghasilkan perubahan sosial dan pemahaman baru. Dalam kerangka teologi publik, percakapan teologis menjadi lebih luas tidak sekedar “mesin penggerak” yang menghubungkan iman dengan realitas publik tetapi *proxi warr* dan industrialisasi algoritma digital di kuasai oleh dunia global, demi kebutuhan dan kepentingan bisnis tanpa ada perlindungan pada kaum minoritas pada aspek agama, pengetahuan, moral, etika, dan minor keterampilan media digital.

Dalam praktiknya Musdah Mulia memberikan perluasan pemahaman yang merugikan sisi kemanusiaan dan tidak ada perlindungan pada kaum minoritas haknya sama di ruang publik itu perlu diaolog di media sosial dengan percakapan dialog antaragama, Diskursus akademik algoritma digital, Debat publik tentang isu etika, keadilan, kemiskinan, lingkungan darat dan laut yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelayanan publik yang selama ini kurang diperbaiki di bidng transportasi, laut dan darat.

5. Relasi Teologi Publik dan Percakapan Teologis

Relasi keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Aspek	Teologi Publik	Percakapan Teologis
Fokus	Ruang publik	Proses dialog
Tujuan	Transformasi sosial	Pemahaman bersama
Metode	Interdisipliner	Dialogis-

hermeneutik

Output Etika sosial, Konsensus,
kebijakan, praksis refleksi baru

Analisis kritis: Teologi publik tidak mungkin berjalan tanpa percakapan teologis, Percakapan teologis menjadi metode epistemologis utama , Keduanya membentuk pendekatan teologi yang: inklusif, komunikatif, relevan secara sosial

6. Isu dan Kritik dalam Literatur

Beberapa kritik utama: Terlalu luas Teologi publik berisiko kehilangan fokus karena mencoba membahas semua isu sosial. Ketegangan identitas Sulit menjaga keseimbangan antara: relevansi public, identitas iman Kristen, Dominasi Barat Model teologi publik sering tidak sepenuhnya cocok untuk konteks Asia atau Indonesia. Minim dialog nyata Banyak diskursus masih akademik, belum menjadi praktik sosial konkret, melawan kekuasaan baru yakni; kekuasaan Industrialisasi Algoritma Digital (IAD) yang membangun ornamen publik yang berkiblat pada materialis semata.

Fenomena *proxy war*, dominasi algoritma digital, berbasis artificial intelligence bisa dibayangkan sebagai medan konflik baru yang tidak lagi bergantung pada tank atau senjata konvensional, tetapi penguasaan jalur-jalur algoritma digital, penguasaan data, demi menguasai persepsi publik. Dalam konteks ini, AI berfungsi sebagai “agen tak terlihat” yang mampu membentuk opini, memperkuat polarisasi, hingga memanipulasi realitas sosial melalui disinformasi, deepfake, dan pengendalian narasi digital. Realitas inilah yang dikritik tegas oleh Musdah Mulia dalam studi teologi publik algoritma digital di ruang-ruang di Flatform digital.

Di ruang digital, perang semacam ini tidak hanya menyerang infrastruktur, tetapi juga kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Di sinilah kebutuhan akan teologi publik menjadi mendesak. Teologi tidak lagi cukup berada di ruang privat atau ritual keagamaan semata, tetapi harus hadir sebagai kerangka

etis yang aktif menilai, mengkritik, dan memberi arah terhadap penggunaan teknologi.

Pendekatan teologi publik sebagaimana digagas oleh Musdah Mulia menekankan bahwa agama harus memanfaatkan algoritma digital dan berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan di ruang publik, termasuk algoritma digital. Dalam perspektif ini, AI tidak boleh dilihat sebagai entitas netral. Ia adalah produk nilai, dan karenanya harus diuji secara etis: Apakah teknologi ini memperkuat martabat manusia atau justru merendharkannya? Apakah ia menciptakan keadilan sosial atau memperdalam ketimpangan dan konflik.

Musdah Mulia menawarkan percakapan persuasif melalui Teologi Publik Algoritma Digital (TPAD) sangat relevan dengan konteks proxy war AI perlu bergerak dalam beberapa arah strategis:

- Dekonstruksi Narasi Digital** Teologi harus mampu membaca dan membongkar narasi manipulatif yang disebarkan melalui AI, terutama yang menggunakan simbol agama untuk memicu konflik.
- Etika Kecerdasan Buatan** Mengembangkan prinsip etis berbasis nilai-nilai universal agama—kejujuran, tanggung jawab, dan kasih—sebagai fondasi pengembangan dan penggunaan AI.
- Literasi Spiritual-Digital** Masyarakat perlu dibekali kemampuan bukan hanya untuk memilah informasi, tetapi juga untuk memahami dampak moral dari interaksi digital mereka.
- Advokasi Keadilan Digital** Teologi publik harus aktif dalam mendorong regulasi dan kebijakan teknologi yang melindungi kelompok rentan dari eksploitasi digital.



7. Sintesis dan Arah Penelitian

Dari literatur yang ada, dapat disimpulkan: Teologi publik adalah teologi yang keluar dari ruang privat menuju ruang sosial. Percakapan teologis adalah metode utama yang memungkinkan teologi publik terjadi. Keduanya bertemu dalam paradigma: teologi sebagai dialog untuk transformasi sosial. Gap penelitian antara lain: a). Minimnya model percakapan teologis kontekstual Indonesia, b). Kurangnya integrasi antara teori dan praktik, c). Belum banyak studi tentang dialog lintas agama berbasis teologi publik.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa: Teologi publik bukan sekadar cabang teologi, tetapi pergeseran paradigma. Percakapan teologis adalah fondasi epistemologisnya. Masa depan teologi bergantung pada kemampuannya: berdialog, kontekstual, relevan secara sosial.

B. Paradigma Teologi Publik Musdah Mulia

Secara metodologi model pemikiran Musdah Mulia bermaksud ingin membangun keadaban publik dengan memanusiakan manusia dengan membangun pemikiran monumental merawat Indonesia agar tetap utuh dan menjadi lokomotif di pentas dunia International. Mencermati pemikiran teologi publik Musdah Mulia penulis berupaya bagaimana teologi publik Musdah Mulia sebagai perspektif membangun keadaban publik di media sosial.

Teologi Publik di ruang-ruang media sosial saat ini banyak dikuasai oleh penguasa algoritma digital sehingga hak-hak kaum minoritas dari aspek agama, pengetahuan teknologi, dan keterampilan menggunakan media sosial yang terbatas jadi korban kekerasan dan diskriminasi. Penulis faham bahwa teologi publik Musdah Mulia dapat dijadikan perspektif untuk membaca persoalan di media sosial, yang kerap kali sebagian orang menumpahkan masalahnya di media sosial. dapat dijadikan perspektif untuk berkontribusi terhadap pembangunan keadaban di ruang media sosial.

berdasarkan data yang ditemukan korban penipuan, diskriminasi semakin tinggi sehingga Membutuhkan Pemikiran Musdah

Mulia sebagai studi keadaban di ruang publik edia sosial. Wawasan teologi publik bisa digunakan perlindungan kaum minoritas dari aspek agama, pengetahuan teknologi, keterampilan menggunakan media sosial dan minoritas dari aspek pemanfaat algoritma digital sebagai kekuatan untuk menguasai opini publik. Penguasaan opini publik yang berlebihan akibat teknologi algoritma berpotensi merusak rasa kemanusiaan sehingga teologi publik algoritma digital sangat penting untuk menjaga kemanusiaan seperti 1). Teologi Pembebasan; Teologi harus membebaskan manusia dari jeratan media sosial, seperti hekker privatisasi orang lain, Penindasan structural di ruang media sosial, Diskriminasi Ketidakadilan sosial di media sosial, 2. Perlindungan Kaum Minoritas, Hak minoritas adalah bagian dari keadilan teologi publik di media sosial, Negara dan agama harus menjamin perlindungan mereka. 3. Teologi Keadilan puublik ada Keadilan gender, Hak asasi manusia terjaga oleh kekuatan algoritma digital setara di ruang publik.

Dengan demikian, proxy war berbasis AI bukan sekadar isu teknologi atau keamanan, tetapi juga menjadi krisis etika dan spiritual karena tidak mampu menciptakan teologi publik media sosial. Tanpa keterlibatan teologi publik algoritma digital, ruang digital berisiko menjadi arena yang dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan tanpa kompas moral dengan memanfaatkan algoritma sebagai mesin penggiring opini publik. Bagi Musdah Mulia bahaya penguasaan sepihak pada algoritma digital bisa menciptakan opini yang tidak sehat, karena otak publik di atur dan dikendalikan oleh algoritma digital.

Musdah Mulia tawarkan gagasan teologi publik algoritma digital untuk memberikan perlindungan kaum minoritas dari aspek agama, pengetahuan, dan keterampilan teknologi digital. Pendekatan kritis Musdah Mulia sangat inklusif teologi publik di ruang digital dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang dapat menjaga martabat kemanusiaan tetap utuh di tengah arus algoritma yang dibangun berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi semata. Musdah Mulia berasumsi

bahwa untuk menjaga kehidupan yang harmoni kebutuhan manusia tidak sekedar politik dan ekonomi tetapi manusia juga butuh kenyamanan sejati. Inilah pentingnya wawasan teologi publik di media sosial dan media digital.

Pemikiran Musda Mulia tentang teologi publik bergerak bukan sekadar sebagai refleksi keagamaan, tetapi sebagai proyek etis yang aktif menata kehidupan bersama. Dalam kerangka ini, teologi tidak berhenti di ruang ibadah atau doktrin privat, melainkan hadir sebagai kekuatan moral yang mengintervensi realitas sosial, terutama dalam melindungi kelompok minoritas dan memastikan hak-hak mereka tetap terjaga di tengah arus dominasi mayoritas dan kekuasaan.

Musda Mulia memposisikan teologi publik sebagai instrumen pembebasan. Ia berangkat dari kesadaran bahwa ruang publik sering kali tidak netral, melainkan dipenuhi relasi kuasa yang dapat menindas. Dalam konteks ini, teologi harus berdiri di pihak yang rentan, bukan menjadi legitimasi bagi kekuasaan. Inspirasi historisnya dapat dilacak pada perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, yang dikenal hingga Afrika Selatan karena keberaniannya melawan kolonialisme dan ketidakadilan birokrasi yang zalim. Sosok ini menjadi simbol bahwa spiritualitas sejati selalu memiliki dimensi keberpihakan sosial.

Dalam perspektif tersebut, teologi publik tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai ilahiah diterjemahkan ke dalam tata kelola publik yang adil. Krisis yang terjadi dalam pelayanan publik—mulai dari kerusakan lingkungan, sistem transportasi yang semrawut, hingga pelayanan yang tidak manusiawi dipandang sebagai manifestasi dari krisis adab teologis. Artinya, persoalan ini bukan semata teknis, melainkan kegagalan moral dalam memahami manusia sebagai subjek yang harus dihormati.

Lebih jauh, Musda Mulia memperluas cakupan teologi publik ke ranah digital. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang dialog dan pembebasan, justru sering berubah menjadi arena konflik, disinformasi, dan

perundungan. Ia melihat adanya logika kapitalistik yang bekerja melalui algoritma digital mengarahkan opini publik, memanipulasi perhatian, dan bahkan membentuk cara berpikir keagamaan secara tidak sadar. Dalam situasi ini, publik yang tidak memiliki literasi kritis mudah terjebak dalam konstruksi realitas yang dikendalikan oleh kepentingan bisnis global.

Musda Mulya mengutip pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassari yang juga memperjuangkan teologi public yang menekankan bahwa menekankan bahwa: “Perjuangan utama adalah melawan kebatilan dan ketidakadilan.” Dalam konteks teologi publik: Kolonialisme bentuk ketidakadilan masa lalu yang dikonstruksi melalui algoritma digital dalam bentuk kolonialisme baru (digital domination).

1. Kritik Terhadap Teologi Publik Musda Mulya

Kritik terhadap teologi publik Musda Mulya di ruang digital berangkat dari satu diagnosis tajam: ruang publik digital bukanlah ruang netral, melainkan medan kuasa yang dikendalikan oleh logika teknologi dan kapitalisme. Jika teologi publik bertujuan memanusiakan manusia, maka ia harus berhadapan langsung dengan struktur digital yang justru berpotensi mendehumanisasi.

a) Algoritma yang Tidak Netral: Kebenaran Dikalahkan oleh Sensasi
Dalam lanskap media sosial, algoritma bekerja seperti kurator tak terlihat yang menentukan apa yang layak dilihat, dibicarakan, dan dipercaya. Namun kurator ini tidak beroperasi dengan prinsip kebenaran, melainkan keterlibatan. Konten yang memancing emosi—amarah, ketakutan, atau kebencian—lebih diutamakan daripada konten yang jernih dan reflektif.

Musda Mulya melihat ini sebagai ancaman serius bagi teologi publik. Jika teologi seharusnya menjadi penjernih moral, maka algoritma justru bertindak sebaliknya: mengeruhkan

kesadaran kolektif. Konflik diperkuat, perbedaan dipertajam, dan narasi keagamaan mudah direduksi menjadi alat provokasi. Dalam situasi ini, teologi berisiko kehilangan otoritas etikanya karena terseret arus sensasionalisme digital.

b) Opini Publik Tidak Tertib: Dari Dialog ke Polarisasi
Ruang digital yang idealnya menjadi forum deliberasi berubah menjadi arena fragmentasi. Polarisasi ekstrem membuat publik terjebak dalam “ruang gema” di mana mereka hanya mendengar suara yang sejalan dengan keyakinannya. Akibatnya, dialog berubah menjadi konfrontasi, dan perbedaan dianggap ancaman, bukan kekayaan. Ujaran kebencian menjadi gejala yang hampir normal. Bahasa kehilangan etika, dan identitas keagamaan sering dijadikan alat untuk menyerang, bukan merangkul. Dalam perspektif Musda Mulya, ini menunjukkan kegagalan teologi publik dalam menjaga adab di ruang bersama. Teologi yang seharusnya membangun kedamaian justru terdistorsi menjadi legitimasi konflik.

c) Dominasi Kapitalisme Digital: Lahirnya “Teologi Algoritmik”
Kritik paling mendasar terletak pada dominasi platform digital yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi. Perusahaan teknologi tidak sekadar menyediakan ruang, tetapi juga membentuk struktur makna dalam ruang tersebut. Mereka mengatur visibilitas, mengarahkan percakapan, bahkan secara tidak langsung membentuk cara berpikir keagamaan publik. Di sinilah muncul apa yang disebut Musda Mulya sebagai “teologi algoritmik” sebuah konstruksi pemahaman keagamaan yang tidak lahir dari refleksi mendalam,

melainkan dari logika distribusi konten. Apa yang sering muncul dianggap benar, apa yang viral dianggap penting. Kebenaran teologis direduksi menjadi popularitas digital. Masalahnya bukan sekadar manipulasi informasi, tetapi pembentukan kesadaran. Publik yang tidak memiliki literasi kritis akan menginternalisasi narasi yang diproduksi oleh algoritma, sehingga tanpa sadar kehilangan otonomi berpikir.

d) Arah Kritik dan Tuntutan

Transformasi Dari tiga problem utama ini, kritik Musda Mulia mengarah pada satu tuntutan strategis: teologi publik harus berevolusi menjadi kekuatan kritis yang mampu membaca, membongkar, dan menata ulang logika digital. Ini berarti: a). Teologi tidak boleh naif terhadap teknologi; ia harus memahami cara kerja algoritma dan dampaknya. b). Teologi harus mengembalikan etika dalam komunikasi digital, menertibkan bahasa, dan memulihkan dialog. Teologi harus melawan dominasi kapitalisme digital dengan membangun kesadaran publik yang kritis dan merdeka.

Jika tidak, teologi publik akan kehilangan relevansinya—bukan karena ia tidak benar, tetapi karena ia kalah cepat dari algoritma yang membentuk realitas sehari-hari. Pada akhirnya, kritik ini bukan sekadar penolakan terhadap dunia digital, melainkan ajakan untuk merebut kembali ruang tersebut. Ruang digital harus diubah dari arena manipulasi menjadi ruang emansipasi—tempat di mana manusia tidak hanya berbicara, tetapi juga dipulihkan martabatnya.

Konsep teologi publik dalam pemikiran Musda Mulia dapat dibaca sebagai upaya menggeser orientasi peradaban: dari logika mesin menuju logika kemanusiaan. Ia melihat

bahwa algoritma publik hari ini tidak lagi sekadar alat teknis, melainkan telah menjadi “struktur tak kasat mata” yang mengatur cara manusia berpikir, merasakan, bahkan beriman. Di titik ini, algoritma bekerja seperti ideologi baru ia membentuk realitas, tetapi tidak pernah mengakuinya.

Masalah utamanya bukan pada teknologinya, melainkan pada orientasi nilai yang menggerakkannya. Algoritma publik cenderung dikendalikan oleh logika industrialisasi: efisiensi, keuntungan, dan akumulasi perhatian. Dalam skema ini, manusia direduksi menjadi data, emosi menjadi komoditas, dan opini menjadi produk yang bisa direkayasa. Akibatnya, ruang publik kehilangan dimensi etikanya—ia tidak lagi menjadi tempat perjumpaan manusia, tetapi pasar yang memperdagangkan kesadaran.

Di sinilah Musda Mulia menawarkan teologi publik sebagai kritik sekaligus alternatif. Secara filosofis, teologi publik berfungsi sebagai “kesadaran normatif” yang menata ulang arah algoritma. Ia bukan sekadar ajaran moral, tetapi kerangka berpikir yang mengembalikan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem. Jika algoritma bekerja dengan logika “apa yang menarik perhatian”, maka teologi publik mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: “apa yang memanusiakan manusia?”

Transformasi yang ditawarkan bukan kosmetik, melainkan struktural. Algoritma publik yang tidak sehat harus direorientasi dari eksploitasi menuju emansipasi. Artinya, teknologi tidak lagi digunakan untuk memperkuat bias, polarisasi, dan kebodohan kolektif, tetapi untuk memperluas kesadaran, keadilan, dan solidaritas. Dalam bahasa Musda Mulia, ini adalah pergeseran dari industrialisasi menuju humanisasi.

Lebih dalam lagi, ia mengidentifikasi adanya krisis teologi publik yang marginal yakni kondisi di mana nilai-nilai keagamaan terpinggirkan dari pengelolaan ruang publik, atau justru disalahgunakan untuk kepentingan sempit. Teologi menjadi kehilangan daya kritisnya; ia tidak lagi membebaskan, tetapi justru membenarkan ketimpangan. Dalam

kondisi ini, agama gagal menjadi cahaya, dan berubah menjadi bayangan yang mengikuti kepentingan kekuasaan.

Teologi publik yang ditawarkan Musdah Mulia justru bergerak ke arah sebaliknya: ia harus menjadi kekuatan pembebasan. Ia hadir untuk menata ulang kesadaran kolektif, membongkar manipulasi algoritmik, dan mengembalikan ruang publik sebagai ruang etis. Dengan demikian, teologi tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi fondasi dalam membangun ekosistem sosial yang adil dan beradab.

Secara filosofis, gagasan ini berpijak pada asumsi bahwa manusia bukan sekadar makhluk rasional atau ekonomi, tetapi makhluk bermakna. Ketika algoritma mengabaikan dimensi makna ini, maka yang lahir adalah krisis kemanusiaan. Karena itu, teologi publik harus hadir sebagai “penjaga makna”—ia memastikan bahwa setiap sistem, termasuk teknologi, tetap tunduk pada tujuan tertinggi: pembebasan dan pemuliaan manusia.

Dengan kerangka ini, teologi publik Musdah Mulia dapat dipahami sebagai proyek besar humanisasi. Ia bukan hanya kritik terhadap dunia digital yang tidak sehat, tetapi juga tawaran jalan keluar: membangun algoritma yang beretika, ruang publik yang berkeadilan, dan peradaban yang menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan alat.

2. Pemikiran Musdah Mulia tentang Teologi Pelayanan publik

Pemikiran Musdah Mulia tentang teologi publik tidak berhenti pada diagnosis krisis, tetapi bergerak ke arah konstruksi sosial yang konkret. Ia melihat bahwa berbagai problem publik bukan sekadar kegagalan sistem, melainkan kegagalan nilai. Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan hanya reformasi teknis, tetapi rekonstruksi kesadaran teologis yang berorientasi pada kemanusiaan.

a) Kerusakan Lingkungan: Dari Eksploitasi ke Etika Perawatan; Dalam pandangan Musdah Mulia, kerusakan darat dan laut bukan sekadar akibat pembangunan yang agresif,

tetapi cerminan dari rapuhnya moral publik. Alam diperlakukan sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai amanah. Implikasi konstruktifnya jelas: teologi publik harus melahirkan etika ekologis. Manusia tidak lagi diposisikan sebagai penguasa absolut atas alam, tetapi sebagai penjaga yang bertanggung jawab. Ini berarti kebijakan lingkungan harus ditopang oleh kesadaran spiritual bahwa merusak alam sama dengan merusak tatanan kehidupan bersama. Teologi publik, dalam hal ini, berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan pembangunan agar selaras dengan keberlanjutan.

- b) Transportasi Publik: Dari Sistem ke Pengalaman Manusia;** Transportasi yang tidak manusiawi menunjukkan bahwa kebijakan publik sering mengabaikan pengalaman nyata masyarakat. Ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan ketidakteraturan mencerminkan absennya nilai empati dalam perencanaan. Musdah Mulia mendorong pergeseran paradigma: transportasi bukan sekadar soal mobilitas, tetapi soal martabat manusia. Teologi publik harus mendorong hadirnya sistem transportasi yang aman, nyaman, inklusif, dan adil. Artinya, pengguna transportasi tidak diperlakukan sebagai angka statistik, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas kenyamanan dan keselamatan.
- c) Pelayanan Publik: Dari Administrasi ke Humanisasi;** Minimnya empati dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa birokrasi berjalan tanpa jiwa. Pelayanan menjadi prosedural, kaku, dan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan manusia. Dalam kerangka teologi publik Musdah Mulia, pelayanan publik harus direorientasi

menjadi praktik kemanusiaan. Aparatur negara tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai etis seperti keadilan, kepedulian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pelayanan yang baik bukan hanya efisien, tetapi juga berempati.

3. Teologi Publik Sebagai Infrastruktur Moral

Ketiga contoh tersebut bermuara pada satu kesimpulan: krisis yang terjadi adalah krisis teologi publik—krisis dalam cara masyarakat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai agama di ruang publik. Musdah Mulia menawarkan konstruksi bahwa teologi publik harus menjadi “infrastruktur moral” yang menopang seluruh sistem sosial. Ia bekerja di balik kebijakan, membentuk cara berpikir para pengambil keputusan, dan mengarahkan perilaku kolektif masyarakat.

Tanpa fondasi ini, pembangunan akan terus menghasilkan kemajuan yang hampa—terlihat maju secara fisik, tetapi rapuh secara kemanusiaan. Sebaliknya, dengan teologi publik yang kuat, ruang-ruang publik dapat ditransformasikan menjadi ekosistem yang adil, beradab, dan memanusiakan manusia. Intinya tegas: jika nilai tidak dibenahi, sistem akan terus gagal, berapa pun canggihnya.

Rekonstruksi teologi publik Musdah Mulia bergerak seperti arsitek peradaban: ia tidak sekadar merenovasi bangunan lama, tetapi mendesain ulang fondasi agar ruang hidup manusia kembali layak dihuni secara bermartabat. Intinya jelas dan tegas: teologi harus menjadi kekuatan yang humanis, membela, dan memanusiakan manusia dalam seluruh dimensi kehidupan termasuk ruang digital yang kini menjadi “alun-alun baru” umat manusia.

4. Teologi Publik dan Etika Digital: Menata Kesadaran di Ruang Tak Kasat Mata

Di tangan Musdah Mulia, etika digital bukan sekadar aturan sopan santun daring,

tetapi disiplin moral untuk menjaga kemanusiaan di tengah arus informasi yang liar. **Literasi media** Literasi media menjadi fondasi utama. Tanpa itu, publik mudah terseret arus disinformasi, propaganda, dan konstruksi realitas yang dikendalikan oleh kepentingan algoritmik. Teologi publik hadir sebagai kompas: mengajarkan kemampuan memilah kebenaran, membaca kepentingan di balik narasi, dan menolak tunduk pada logika viralitas semata. Ini bukan sekadar soal “cerdas bermedia”, tetapi soal menjaga martabat akal sehat manusia. **Tanggung jawab sosial** Setiap individu di ruang digital adalah produsen makna. Maka, teologi publik menuntut tanggung jawab atas setiap kata, unggahan, dan opini. Kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi kedok untuk merusak. Dalam kerangka ini, iman tidak lagi diukur dari ritual semata, tetapi dari dampak sosial yang dihasilkan dalam interaksi digital.

a. Humanisasi Ruang Publik: Dari Arena Konflik ke Ekosistem Dialog

Musdah Mulia melihat ruang publik baik fisik maupun digital telah mengalami degradasi etis. Karena itu, teologi publik harus turun tangan sebagai kekuatan yang “menjinakkan” ruang tersebut agar kembali manusiawi.

- 1) **Anti-bullying** Perundungan, baik verbal maupun simbolik, adalah bentuk kekerasan modern yang sering dinormalisasi. Teologi publik menolak keras praktik ini karena bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Tidak ada legitimasi religius bagi penghinaan, dehumanisasi, atau kekerasan psikologis. Dalam perspektif ini, membela korban bullying adalah tindakan teologis, bukan sekadar sosial.
- 2) **Pro-dialog** Alih-alih mempertajam polarisasi, teologi publik mendorong dialog sebagai jalan utama. Dialog bukan berarti kompromi tanpa prinsip, tetapi kesediaan untuk mendengar, memahami, dan mencari titik temu tanpa menghilangkan integritas. Ruang

publik ideal adalah ruang di mana perbedaan tidak memicu permusuhan, melainkan memperkaya pemahaman bersama.

b. Teologi sebagai Ideologi Pembebasan: Dari Kesadaran ke Aksi

Pada tahap paling mendasar, rekonstruksi ini menegaskan bahwa teologi harus menjadi ideologi pembebasan—alat untuk melawan segala bentuk penindasan yang merendahkan manusia.

1) Membebaskan dari penindasan

Teologi tidak boleh netral di hadapan ketidakadilan. Ia harus berpihak secara eksplisit kepada mereka yang tertindas, baik oleh kekuasaan politik, ekonomi, maupun struktur sosial yang timpang. Netralitas dalam konteks ketidakadilan adalah bentuk keberpihakan terselubung kepada penindas.

2) Membebaskan dari manipulasi digital

Era digital menghadirkan bentuk baru penindasan: manipulasi kesadaran melalui algoritma. Opini publik dapat direayasa, emosi dimonetisasi, dan perhatian dikendalikan. Teologi publik harus membongkar mekanisme ini dan membangun kesadaran kritis agar manusia tidak menjadi objek, melainkan subjek yang merdeka.

3) Membebaskan dari ketidakadilan sosial

Ketimpangan akses, layanan publik yang buruk, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat adalah bentuk nyata dari kegagalan moral kolektif. Teologi publik berfungsi sebagai energi etik yang mendorong perubahan sistemik bukan hanya mengkritik, tetapi juga membangun alternatif yang lebih adil dan manusiawi.

5. Teologi Publik sebagai Infrastruktur Kemanusiaan

Teologi publik dalam rekonstruksi pemikiran Musdah Mulia dapat dibayangkan sebagai fondasi sunyi yang menyangga bangunan besar bernama kehidupan bersama. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi menentukan kokoh atau rapuhnya relasi sosial, adil atau timpangnya distribusi kekuasaan, serta manusiawi atau tidaknya pelayanan publik. Dalam pengertian ini, teologi publik berfungsi sebagai *infrastruktur moral kemanusiaan* sebuah sistem nilai yang bekerja diam-diam, membentuk kesadaran kolektif tanpa harus selalu disadari.

Musdah Mulia menggeser teologi dari posisi simbolik menuju posisi operasional di ruang publik media sosial. Teologi tidak lagi cukup hadir sebagai narasi normatif yang indah diucapkan, melainkan harus menjelma menjadi energi etis yang mengatur cara manusia berpikir, bertindak, dan berelasi. Ia menjadi semacam “arsitektur batin” yang menentukan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, bagaimana institusi menjalankan kekuasaan, dan bagaimana masyarakat merawat ruang publiknya.

Dalam kerangka ini, teologi publik bekerja seperti sistem saraf dalam tubuh sosial. Ia mengalirkan nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab ke setiap aspek kehidupan dari kebijakan negara hingga percakapan sehari-hari di media sosial. Ketika infrastruktur ini sehat, maka yang muncul adalah ekosistem sosial yang tertib dan berkeadaban: pelayanan publik yang manusiawi, ruang digital yang mencerahkan, serta hubungan sosial yang dilandasi penghormatan terhadap martabat manusia.

Sebaliknya, ketika teologi kehilangan fungsi infrastrukturnya, yang terjadi adalah disorientasi moral. Nilai-nilai agama tetap diucapkan, tetapi tidak lagi mengarahkan tindakan. Akibatnya, ruang publik menjadi bising tanpa makna, kekuasaan berjalan tanpa etika, dan teknologi berkembang tanpa kendali kemanusiaan. Teologi dalam kondisi ini hanya menjadi gema berulang, terdengar, tetapi tidak berdaya mengubah realitas.

Musdah Mulia menolak bentuk teologi yang demikian. Ia menegaskan bahwa teologi

harus hidup dan bekerja. Hidup berarti ia hadir dalam kesadaran sehari-hari, tidak terasing dari realitas. Bekerja berarti ia memiliki daya transformasi mampu mengoreksi ketimpangan, menertibkan kekuasaan, dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

Dengan demikian, teologi publik sebagai infrastruktur moral bukan sekadar konsep abstrak, melainkan strategi peradaban. Ia menjadi dasar bagi terciptanya ruang hidup yang aman, nyaman, dan adil. Pada titik inilah teologi mencapai fungsi tertingginya: bukan hanya menjelaskan manusia, tetapi benar-benar memanusiakan manusia.

Kesimpulan

1. Kesimpulan pemikiran Musdah Mulia tentang teologi publik dapat dirumuskan sebagai kerangka etis-transformasional yang menempatkan agama sebagai kekuatan aktif dalam membangun peradaban yang adil dan manusiawi. Teologi publik tidak lagi bersifat pasif atau normatif semata, melainkan menjadi praksis sosial yang membebaskan dan menata kehidupan bersama. Teologi publik Musdah Mulia adalah:
2. Teologi pembebasan: membebaskan manusia dari penindasan struktural, baik dalam bentuk kekuasaan politik, ekonomi, maupun dominasi budaya. Teologi keadilan: memastikan keberpihakan pada kelompok rentan dan minoritas, serta menolak segala bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Teologi kemanusiaan: menempatkan manusia sebagai pusat nilai, sehingga setiap kebijakan dan praktik sosial harus memanusiakan manusia.
3. Teologi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kenyamanan publik: menghadirkan agama sebagai dasar etis dalam menciptakan pelayanan publik yang aman, bersih, tertib, dan menyejahterakan. Dalam konteks era digital, teologi publik mengalami perluasan medan perjuangan. Ia tidak cukup hadir di ruang fisik, tetapi harus

masuk ke dalam ekosistem digital yang kini membentuk kesadaran publik.

4. Teologi publik harus menjadi alat kritis untuk melawan dominasi algoritma yang berpotensi memanipulasi opini, memperkuat bias, dan mengeksploitasi ketidaksadaran publik. Teologi publik harus berperan dalam membangun ruang publik digital yang: Damai, Adil, Memanusiakan manusia. Dengan demikian, teologi publik Musdah Mulia merupakan visi teologis yang bersifat emansipatoris dan kontekstual sebuah upaya sadar untuk menjadikan agama sebagai fondasi pembebasan, keadilan, dan kemanusiaan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2014). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam studi keislaman*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 52(1), 1–20.
- Abokhodair, N., et al. (2020). *Holy tweets: Quran sharing on Twitter*. Social Media + Society.
- Adams, N. (2019). *Public theology and political engagement*. International Journal of Public Theology, 13(2), 123–140.
- Aduragba, O. T., et al. (2022). *Religion and spirituality on social media*. Journal of Digital Religion.
- Azra, A. (2017). *Islam moderat di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Studia Islamika, 24(2), 231–260.
- Baidhaw, Z. (2015). *Islam dan keadilan sosial dalam perspektif teologi publik*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 53(1), 1–24.
- Beaumont, J. (2018). *Faith in the public sphere: Religion, secularism, and urban governance*. Geoforum, 91, 15–24.
- Bedford-Strohm, H. (2013). *Public theology and political responsibility*. International Journal of Public Theology, 7(2), 125–135.
- Breitenberg, E. (2003). *What is public theology?* Journal of Religious Ethics, 31(1), 55–70.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. Chicago: University of Chicago Press.

- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Cloke, P. (2011). *Faith-based organizations and social transformation in the city*. Urban Studies, 48(6), 1211–1227.
- Cloke, P. (2011). *Faith-based organizations and social welfare*. Environment and Planning A, 43(1), 1–19.
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Cambridge: Polity.
- Dinham, A. (2015). *Religion and public policy: Understanding the role of faith in governance*. Journal of Contemporary Religion, 30(3), 345–362.
- Dinham, A. (2015). *Religion and public policy*. Journal of Social Policy, 44(3), 441–459.
- Effendi, K. L., & Ulya, Z. (2023). *Pemikiran Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang keadilan dalam poligami*. Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2).
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. London: Sage.
- Graham, E. (2013). *Between a rock and a hard place: Public theology in a post-secular age*. International Journal of Public Theology, 7(4), 380–398.
- Graham, E. (2013). *Between a rock and a hard place: Public theology*. Practical Theology, 6(1), 1–15.
- Habermas, J. (2006). *Religion in the public sphere*. European Journal of Philosophy, 14(1), 1–25.
- Hidayat, K. (2016). *Agama dan ruang publik dalam konteks keindonesiaan*. Jurnal Paramadina, 13(1), 1–15.
- Hollenbach, D. (2002). *The common good and Christian ethics*. Cambridge University Press.
- Kim, S. (2011). *Public theology in the age of globalization*. International Journal of Public Theology, 5(1), 1–12.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Jakarta: Kibar Press.
- Mulia, S. M. (2014). *Ensiklopedia Muslimah reformis: Pokok-pokok pemikiran untuk reaktualisasi ajaran Islam*. Jakarta: Mizan.
- Mulia, S. M. (2019). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Murtaza, A. M., et al. (2023). *Konseptualisasi hak asasi manusia: Studi atas pandangan Musdah Mulia*. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(1). <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.741>
- Nasution, Z. S., et al. (2024). *Perkawinan dalam Islam di era modern perspektif Musdah Mulia*. Tadhkirah: Jurnal Hukum Islam.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression*. New York: NYU Press.
- Nuraidah, S., et al. (2023). *Pemikiran Musdah Mulia terhadap ayat bias gender*. Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 2(3).
- Nussbaum, M. (2011). *Creating capabilities*. Harvard University Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. New York: Penguin.
- Rofiq, M. A., & Rodiah, I. (2022). *Kesetaraan gender dan reformasi hukum: Pemikiran Amina Wadud dan Musdah Mulia*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender.
- Romadhon, F. F., et al. (2025). *Konsep poligami dalam Al-Qur'an (Studi Musdah Mulia)*. Journal of Comprehensive Science, 4(3), 1104–1116.
- Salam, N. (2023). *Tafsir Musdah Mulia terhadap larangan perkawinan beda agama*. Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2(2).
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.
- Syahanti, S. H., et al. (2019). *Analisis pemikiran Musdah Mulia tentang wali nikah*. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 3(1).
- Taylor, C. (2007). *A secular age*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tracy, D. (1981). *The analogical imagination: Christian theology and the culture of pluralism*. New York: Crossroad.
- Volf, M. (2011). *A public faith: How followers of Christ should serve the common good*. Grand Rapids: Brazos Press.
- Yurinta, A. (2024). *Pernikahan sesama jenis dalam perspektif feminis radikal (Studi pemikiran Musdah Mulia)*. Jurnal ISO, 6(1).
- Zainuddin, M. (2018). *Teologi publik Islam dalam konteks Indonesia*. Jurnal Ushuluddin, 26(2), 197–210.